



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 215/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NYOMAN PASEK ADINI., Tempat lahir Denpasar 31 Desember 1945, Umur 76 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. P. Komodo 32X Banyuning Timur RT. 000 RW. 000 Ds. Banyuning Kec. Buleleng Kab. Buleleng - Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Made Wedastra Utama berdasarkan Akte Pemberian Kuasa Khusus Nomor 3 / S.K / 2021 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN:

PT. BPR SRI ARTHA LESTARI, yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 110 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 804/Pdt.G/2020/PN.Dps, tanggal 6 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Hal. 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 215/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI & REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.725.000 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2021 Kuasa Insidentil Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 804 / Pdt.G / 2020 / PN.Dps tanggal 6 Oktober 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 804/Pdt.G/2020/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2021 untuk mempelajari berkas sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Hal. 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 215/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkan putusan oleh Pengadilan Tinggi, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 804/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 6 Oktober 2021, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 804/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 6 Oktober 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal 199 RBg. Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 215/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 804/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 6 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, oleh kami I Made Supartha, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Ketut Wanugraha, SH dan H. Sumino, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 215/PDT/2021/PT DPS tanggal 1 Desember 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Ni Wayan Sadiasih, SH selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Gede Ketut Wanugraha, S.H.

I Made Supartha, SH.MH.

H.Sumino, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 215/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Wayan Sadiasih, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Meterai	:	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan	:	Rp130.000,00
Jumlah		:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 215/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 halaman, Putusan Nomor 215/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)